



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020**



TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEGIATAN 2020

1. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Seksi : Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
 4. Program : Pelayanan Keluarga Berencana
 5. Kegiatan : Pembinaan Kampung KB
 6. Pagu Anggaran : Rp. 20.250.000,-
 7. Lokasi : 51 KKB di 15 Kecamatan
 8. Tahun Angg : Tahun 2020
-

BAB I

A. Pendahuluan

Meningkatkan kualitas hidup Keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima lintas sektor.

Pedoman Pengelolaan Kampung KB terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta

dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Tersedianya Dana untuk penunjang Kegiatan Pembinaan di Kampung KB yaitu sebanyak 51 KKB, dan merupakan dana sering (APBD) untuk pemantauan kegiatan Operasional Penggerakan KKB (DAK Non Fisik) dan Kegiatan ini dilaksanakan di bawah dengan koordinator PKB/PLKB di wilayah binaan masing-masing.
- b. Penyediaan Dana untuk menunjang pengadaan data-data di seluruh rumah data KKB.

Tujuan

- a. Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya TFR 2,36 pada akhir tahun 2020.
- b. Terlaksanakan Kegiatan Pembinaan Bangsa Kencana KKBPK di Nagari- nagari
- c. Terlaksananya pembinaan kegiatan di Kampung KB.
- d. Tersedianya dana untuk cetak data-data rumah data di kampung KB.

C. Dasar

1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun

2018 Tanggal November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2020.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sasaran Kampung KB

1. Sasaran Langsung :
 - a. Keluarga
 - b. Pasangan Usia subur
 - c. Masyarakat
 - d. Balita, Remaja dan lansia
2. Sasaran Tidak langsung :
 - a. Tokoh-tokoh masyarakat
 - b. Organisasi, Masyarakat (PPKBD,DKM, Organisasi Pemuda, dll)
 - c. Petugas Lapangan dan Provider.
3. Pembinaan Kampung KB :
 - a. Melakukan Pembinaan terhadap 51 Kampung KB yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Memberikan penyuluhan terhadap kader-kader yang ada di Kampung KB.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap PKB dan PLKB terhadap pengelolaan Kampung KB.
 - d. Pembinaan terhadap Rumah Data Ku (RDK) yang ada di Kampung KB.
 - e. Mengajak lintas sektor untuk dapat bekerjasama dalam mengkroyong kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik yang bersifat pemberdayaan di Kampung KB.

B. Dukungan Anggaran :

Kegiatan Pembinaan Kampung KB dengan Pagu Dana sebesar :Rp. 20.250.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Rincian sbb :

NO	Kegiatan	Jumlah Dana Rp	Ket
1.	Belanja BBM	2.600.000,-	
2.	Belanja Cetak	5.000.000,-	
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,-	
4.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm Provinsi	1.050.000,-	
5	Honor PPTK	6.900.000,-	
	Jumlah	20.250.000,-	

Namun pada bulan maret 2020, Anggaran pembinaan kampung KB yang awalnya di sediakan sebesar Rp. 20.250.000,- (Dua Puluh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sesuai dengan instruksi pimpinan bahwa seluruh dana kegiatan direfosing dan dialihkan untuk dana penanganan wabah covid 19, dana kegiatan ini baru terealisasi sebesar Rp. 3.234.000,- (Tiga Juta Dua ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

1. Realisasi Anggaran :

NO	Kegiatan	Jumlah Dana Rp	Realisasi
1.	Belanja BBM	2.600.000,-	309.000,-
2.	Belanja Cetak	5.000.000,-	
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,-	150.000,-
4.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm Provinsi	1.050.000,-	675.000,-
5.	Honor PPTK	6.900.000,-	2.100.000,-
	Jumlah	20.250.000,-	3.234.000,-

BAB III KENDALA DAN SOLUSI

1. Kendala :

- Karena Anggaran Kegiatan Pembinaan kampung KB dari bulan Maret 2020 di alihkan atau di hapuskan ,maka kegiatan belum dapat dilaksanakan untuk itu kendala juga tidak lkita temui.

2. Solusi :

Solusi terhadap permasalahan untuk kegiatan Pembinaan Kampung KB juga tidak ada karena kegiatannya sudah dihapuskan dan kegiatan belum terlaksana.

BAB III PENUTUP

1. KESIMPULAN :

- a. Kampung KB merupakan salah satu program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa.
- b. Dengan adanya Kampung KB, diharapkan manfaat program KB dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama diwilayah kategori miskin, padat penduduk, terpencil yang tersebar di indonesia.
- c. Kampung Keluarga Berencana sangat di perlukan, sebab keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera untuk menuju yang lebih baik.
- d. Setiap Kampung KB diharapkan dapat menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, untuk dapat mewujudkan peningkatan dan dapat melibatkan seluruh lintas sektor dan dapat bekerjasama dalam menunjang dan meningkatkan program-program dan kegiatan di kampung KB.

2. SARAN

1. Untuk tahun 2021 ini, hendaknya kegiatan Pembinaan Kampung KB ini dapat dimunculkan kembali, karena Kegiatan ini adalah dana sering atau pendamping

untuk pelaksanaan Kegiatan di kampung KB dan juga penunjang pengadaan data-data di rumah data.

2. Pembinaan Kampung KB ini hendaknya selalu dapat dilakukan terutama oleh OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, karena mengingat Kampung KB di Pesisir Selatan cukup banyak, yaitu 51 Kampung KB.
3. Pembinaan terhadap Kampung KB ini juga diharapkan dari Pemerintahan Nagari, dan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dll) hal ini guna pembinaan dan penyebaran informasi tentang peningkatan ekonomi masyarakat dan pembinaan terhadap Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) yang ada di wilayah Kampung KB tersebut.
4. Pembinaan Kampung KB ini harapkan juga dari Provinsi yaitu Perwakilan BKKBN yang mana masalah kepegawaian PKB dan PLKB adalah di bawah kendalinya, untuk itu agar dapat memberikan penekanan terhadap PKB dan PLKB terhadap kemajuan dan penggerakan kampung KB di wilayah kerjanya.
5. PKB dan PLKB di bawah Koordinator Lapangan agar selalu melakukan pembinaan terhadap kader kampung KB dan kelompok kegiatan.

**Diketahui Oleh :
KPA**


IRWANSYAH S.K.M.MPH
Nip. 19640923 198903 1 007

**Painan, Desember 2020
PPTK**


= HALIMA.SH =
NIP.19700909 199403 2 004

**Mengatahui :
Kepala
DPMD & PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan**


WENDLS, H.M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005